

PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH

Putu Nadya Kardevi Rakatitha¹
Gayatri²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: nadyarakatithaa@gmail.com/Tlp: 085936110347

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi pada daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pajak kendaraan bermotor pada pendapatan asli daerah, dan pengaruh bea balik nama kendaraan bermotor pada pendapatan asli daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan runtun waktu (*time series*) periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, dengan menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah dan nilai rata-rata kontribusinya yaitu sebesar 31,94 persen, lalu kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor juga menyatakan berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah dengan nilai rata-rata kontribusinya yaitu sebesar 39,55 persen.

Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Tax is a tool for the government in achieving the objective of obtaining both direct and indirect receipts to finance routine expenditure as well as national and economic development of the community. Regional Tax and Regional Retribution is one of the most important sources of income to finance the implementation of regional government and regional development in order to secure autonomy in a wide, tangible and responsible area. One type of local taxes are tax vehicle and cost of vehicle. This study aims to examine the effect of tax vehicle on locally-generated revenue, and the cost of vehicle refund on locally-generated revenue. The data used are secondary data that uses time series from 2013 to 2016, using documentation method done at Bali Province Income Board. Sampling method used is non probability sampling method with purposive sampling technique. Data analysis used in this research is multiple linear regression analysis. The result of the analysis shows that the contribution of tax vehicle has a positive

effect on the locally-generated revenue and the average contribution value is 31.94 percent, then the contribution of cost of vehicle also states a positive effect on the locally-generated revenue with the average value of its contribution is equal to 39.55 percent.

Keywords: *Tax Vehicle, Cost of Vehicle, Locally-Generated Revenue*

PENDAHULUAN

Fungsi dari pemerintah, baik pusat maupun daerah adalah sebagai lembaga ekonomi. Hal ini dikarenakan pemerintah melakukan berbagai macam pengeluaran atau belanja untuk semua kegiatan operasional, sehingga menimbulkan pula berbagai upaya oleh pemerintah untuk memperoleh pendapatan atau penerimaan guna memenuhi semua pengeluaran tersebut (Rosalina, 2008). Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya melakukan pembangunan di segala sektor, baik yang berupa fisik maupun mental. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus mendukung tercapainya tujuan nasional. Dalam upaya pembangunan secara nasional, maka pembangunan daerah adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan, di mana kapasitas pemerintah daerah diupayakan agar meningkat, sehingga tercipta suatu pemerintah daerah yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Natalia, 2014). Selain itu, pembangunan daerah juga merupakan bagian dari kemampuan mengelola sumber daya ekonomi daerah agar dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah untuk membiayai operasional pemerintahan dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat (Mangkoesoebroto, 1993).

Daerah Bali merupakan salah satu daerah otonomi. Pemberian otonomi terhadap daerah dimaksudkan agar daerah menjadi lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk digunakan bagi pembangunan daerah dan

kesejahteraan masyarakat. Adanya otonomi daerah telah mendorong daerah-daerah untuk berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka untuk membiayai berbagai pengeluaran daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi kekuasaan. Sumber pendapatan daerah sendiri terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Halim, 2001:110).

Konsekuensi dari pemberian otonomi kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, maka setiap daerah berhak untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya agar menghasilkan penerimaan bagi daerah, di mana salah satunya adalah mengenakan pungutan berupa pajak kepada masyarakat (Mustika, 2013). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah ditujukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, sehingga tujuan dari pajak itu sendiri untuk meningkatkan penerimaan daerah, dan bukan untuk memberatkan masyarakat (James & Alley, 2004). Pajak merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menyokong pembangunan daerah dan merupakan pemasukan yang potensial karena terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik (Susena, 2014).

Kesadaran masyarakat untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah di sektor perpajakan (Vines & Moore,

1996). Pentingnya pengetahuan perpajakan dari seorang wajib pajak akan memengaruhi kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti bahwa pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin pahamnya wajib pajak tentang perpajakan, maka semakin tinggi juga wajib pajak tersebut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Menurut Eriksen & Fallan (dalam Palil, 2005), mengemukakan bahwa ketika tingkat pengetahuan perpajakan seseorang tersebut tinggi, maka tingkat penghindaran pajaknya rendah atau dengan kata lain kepatuhan pajaknya menjadi tinggi. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah dengan diberlakukannya kebijakan *self assessment system* membawa misi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela (Darmayanti, 2004). Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Danuta, 1997). Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003:60). Parasuraman, et al. (1988) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Terakhir, pengetahuan wajib pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Knut Eriksen, 1996), di mana dengan adanya pengetahuan maka timbul kepercayaan moral dalam diri wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Daniel Ho,

2009). Meningkatnya kepatuhan memicu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela, sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Palda & Honousek, 2002). Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam negeri, sehingga perlu dikaji secara intensif terkait faktor-faktor yang mempengaruhinya (Chau, 2009).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sebagai konsekuensi dari diberlakukannya otonomi daerah. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah tingkat I dibagi menjadi 5 jenis pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Dari beberapa komponen pajak daerah yang dikelola di Provinsi Bali, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana perkembangan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terkait dengan penerapan tarif progresif atas kedua jenis pajak ini.

Dalam pendapatan daerah, pemerintah menetapkan suatu target yang harus dicapai. Jika pendapatan melebihi target tersebut, maka akan berdampak positif bagi daerah tersebut, dan sebaliknya jika pendapatan tidak mencapai target tersebut, maka dapat berdampak buruk bagi daerah dan perlu dievaluasi penyebab kegagalan mencapai target yang telah ditetapkan (Budi, dkk, 2016). Selain itu, pemerintah juga perlu melihat besar kontribusi pajak daerah tersebut pada pendapatan asli daerah.

Berdasarkan data kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali tahun 2013-2016, maka secara rata-rata pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki kontribusi paling besar bagi pendapatan asli daerah, di mana masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 31,13 persen dan 38,72 persen.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah tingkat I, yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut, terhitung saat mulai pendaftaran, dan dibayar sekaligus dimuka (Musnal, 2015). Pajak ini akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor sebagai dampak dari peningkatan perekonomian masyarakat. Terlebih dewasa ini, kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari, sehingga minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor sangat tinggi (Zulkifli, 2013). Berdasarkan data jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun, sehingga membawa konsekuensi buruk bagi daerah, salah satunya adalah kemacetan (Margaretha, dkk, 2016). Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bali akhirnya menerapkan tarif pajak progresif bagi kepemilikan kendaraan bermotor untuk menekan volume kendaraan bermotor dan mengurangi tingkat kemacetan yang terjadi.

Penelitian serupa oleh (Winarso, 2015) menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor berhubungan positif dengan pendapatan asli daerah, di

mana penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan, sedangkan pendapatan asli daerah pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan PAD pada tahun 2011. Hasil penelitian lainnya oleh Septiani, dkk (2012) menyatakan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan pada tahun 2013 dibandingkan pada tahun 2009 sebesar 0,75 persen.

Pajak dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) *grand theory*, yaitu teori kekuasaan paksaan yang berarti sifat pajak yang memaksa, sehingga apabila tidak dipatuhi maka akan dikenakan sanksi/hukuman oleh negara. Lalu teori yang kedua yaitu, teori harapan adalah penerapan kebijakan di sektor perpajakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah yang bertujuan agar seseorang atau kelompok termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan teori yang terakhir, yaitu teori asas daya beli terkait dengan tujuan pemungutan pajak yang pada akhirnya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor (Siahaan, 2010:175). Oleh karena itu, sebagai warga negara atau wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor, hendaknya memiliki kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena hal tersebut merupakan tanggung jawab kita sebagai pemilik kendaraan bermotor. Dalam teori kekuasaan paksaan

dijelaskan bahwa apabila terdapat masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman oleh negara. Penelitian oleh Fajariani (2013) mengenai pengenaan tarif pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor berdasarkan *The Four Maxims* menunjukkan bahwa asas dalam *The Four Maxims* masih relevan untuk diterapkan dalam dunia perpajakan. Selain itu, hasil penelitian Yunus (2010) menunjukkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor relatif besar terhadap pendapatan asli Provinsi Gorontalo selama 4 (empat) tahun terakhir periode 2006-2009. Hasil penelitian lainnya diperoleh Musnal (2015) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor dengan pendapatan asli daerah selama periode 2013-2014. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁ : Kontribusi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah

Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai antara dua pihak atau perbuatan sepihak yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pasal 1 Ayat (14) UU No. 28 Tahun 2009). Pada dasarnya, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tidak dapat dipisahkan dari pajak kendaraan bermotor, karena setiap terjadi transaksi jual beli kendaraan bermotor, maka secara otomatis akan terjadi transaksi pembayaran atas pajak kendaraan bermotor (Suprayetno, 2003). Teori daya beli mempunyai pengaruh yang positif terhadap bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) agar dapat meningkatkan pendapatan asli

daerah (PAD). Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya pada penerimaan atas bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), maka diperlukan peran pemerintah daerah agar mampu menciptakan kondisi perekonomian yang stabil, sehingga perekonomian masyarakat dapat terus bertumbuh dan berkembang kearah positif yang berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat (Syaiful, 2013). Hasil penelitian oleh Oktofiandry, dkk (2015) mengemukakan bahwa realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor mengalami peningkatan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, namun mengalami penurunan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Penurunan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor disebabkan oleh munculnya perusahaan-perusahaan *leasing* yang mengganggu sistem pembayaran pajak dan masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami penerapan pajak progresif.

Sedangkan, penelitian oleh Margaretha, dkk (2016) menunjukkan Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012-2014, dikarenakan besaran penerimaan BBNKB sangat tergantung pada transaksi jual beli motor bekas, sehingga tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian serupa diperoleh Agustina, dkk (2015) yang menjelaskan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2003-2012, dikarenakan meskipun jumlah kendaraan bermotor di

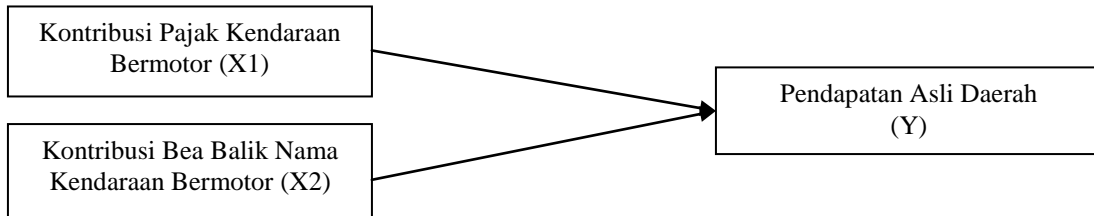
provinsi Kalimantan Selatan cukup tinggi, namun kontribusi penerimaan BBNKB terhadap PAD masih terhitung kecil.

Hipotesis yang ditetapkan untuk menguji pengaruh bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada penelitian ini akan mengacu pada pendapat bahwa bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dikarenakan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor berdampak pada minat masyarakat untuk membeli kendaraan baru atau membalik namakan kendaraannya atas nama anggota keluarganya yang lain, sehingga penerimaan BBNKB I dan BBNKB II diharapkan akan mengalami peningkatan yang stabil, sehingga berpengaruh pula terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H₂ : Kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif dengan tipe kausalitas. Berdasarkan permasalahan penelitian, kajian teoritis dan hasil penelitian sebelumnya, maka desain penelitian yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Desain Penelitian

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Tjok Agung Tresna, No. 14, Renon Denpasar. Adapun alasan pemilihan lokasi ini karena Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali bertugas untuk menyelenggarakan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah, dimana salah satu pendapatan daerah bersumber dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Objek penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah setiap bulannya mulai dari periode 2013-2016 di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, yang besarnya diperoleh dengan menjumlahkan besaran pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan, variabel bebas dalam penelitian ini adalah kontribusi pajak kendaraan bermotor dan kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD dapat dihitung dengan membandingkan besaran realisasi PKB dengan besaran realisasi

PAD. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat adanya jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap PAD dapat dihitung dengan membandingkan besaran realisasi BBNKB dengan besaran realisasi PAD.

Data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum dan sejarah berdirinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pendapatan asli daerah (PAD) periode 2013-2016. Sedangkan, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pendapatan asli daerah periode 2013-2016.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah di Provinsi Bali, di mana penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* agar memperoleh sampel yang representatif, dengan kriteria sampel yang digunakan adalah data realisasi pajak kendaraan bermotor, realisasi bea balik nama kendaraan bermotor, dan realisasi pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali periode 2013-2016.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, dengan mengamati dokumen-dokumen, laporan-laporan yang

berhubungan dengan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Selain itu, digunakan pula metode survei dengan teknik wawancara untuk mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan terkait dengan penelitian ini, seperti informasi dalam bidang perpajakan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, sehingga dapat diukur derajat keeratan hubungan serta arah dari hubungan antara variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. Bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y : Pendapatan Asli Daerah
- α : Konstanta
- X_1 : Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor
- X_2 : Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- β_1, β_2 : Koefisien regresi variabel independen
- e : *Error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa selama periode penelitian realisasi pajak kendaraan bermotor Provinsi Bali selalu mencapai target dan mengalami peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun, sehingga dapat disimpulkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali selama tahun 2013-2016 sudah cukup baik. Sedangkan, dapat diketahui pula selama periode penelitian realisasi balik nama kendaraan bermotor tidak selalu mencapai target di mana hal tersebut terjadi pada

tahun 2015 dan 2016. Selain itu, pada selama periode yang sama baik target maupun realisasi bea balik nama kendaraan bermotor mengalami tren penurunan. Oleh karena itu, penerapan Perda No. 8 Tahun 2016 diharapkan mampu meningkatkan besaran realisasi bea balik nama kendaraan bermotor, baik untuk BBNKB I maupun BBNKB II, sehingga akan meningkatkan pula pendapatan asli daerah Provinsi Bali.

Pengujian statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran umum tentang sampel, seperti nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel dalam penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Hasil Statistik Deskriptif

No	Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
1	X1	48	47699697200.0	105190364728	74169379508.0	111254897003.0
2	X2	48	65298778300.0	121159983000	90929000728.0	11082124980.3
3	Y	48	152981084891.0	370823442818	231637695169.0	38255895683

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 1 pada variabel pajak kendaraan bermotor (X_1) diperoleh nilai terendah (minimum) dan nilai tertinggi (maximum) masing-masing sebesar Rp 47.699.697.200,00 dan Rp 105.190.364.728,00. Nilai tengah (mean) sebesar Rp 74.169.379.508,80; dengan nilai deviasi standar sebesar Rp 11.125.489.700,30. Nilai terendah (minimum) penerimaan pajak kendaraan bermotor terjadi pada bulan Maret 2013 sebesar Rp 47.699.697.200,00 dan nilai tertinggi (maximum) terjadi pada bulan November 2016 sebesar Rp 105.190.364.728,00.

Pada variabel bea balik nama kendaraan bermotor (X_2) diperoleh nilai terendah (minimum) dan nilai tertinggi (maximum) masing-masing sebesar Rp 65.298.778.300,00 dan Rp 121.159.983.000,00. Nilai tengah (mean) sebesar Rp 90.929.000.728,00; dengan nilai deviasi standar sebesar Rp 11.082.124.980,30. Nilai terendah (minimum) penerimaan pajak kendaraan bermotor terjadi pada bulan Juli 2016 sebesar Rp 65.298.778.300,00 dan nilai tertinggi (maximum) terjadi pada bulan Juli 2013 sebesar Rp 121.159.983.000,00.

Pada variabel pendapatan asli daerah (Y) diperoleh nilai terendah (minimum) dan nilai tertinggi (maximum) masing-masing sebesar Rp 152.981.084.891,00 dan Rp 370.823.442.818,00. Nilai tengah (mean) sebesar Rp 231.637.695.169,00; dengan nilai deviasi standar sebesar Rp 38.255.895.683,00. Nilai terendah (minimum) penerimaan pajak kendaraan bermotor terjadi pada bulan Maret 2013 sebesar Rp 152.981.084.891,00 dan nilai tertinggi (maximum) terjadi pada bulan November 2016 sebesar Rp 370.823.442.818,00.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual berdistribusi normal atau tidak, di mana pengujian dilakukan dengan menggunakan uji non parametrik *one-sample Kolmogorov-Smirnov*. Uji normalitas menyatakan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,064 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga data telah berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan antar variabel bebas dalam model regresi. Uji multikolinieritas menyatakan bahwa masing-

masing variabel memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10, sehingga model regresi bebas dari gejala multikolinearitas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat penyimpangan terhadap suatu observasi oleh penyimpangan lain atau terjadi korelasi diantara observasi menurut waktu dan tempat. Uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,946, sedangkan nilai $d_U = 1,8$ dan $4 - d_U = 3,2$ sehingga berada dalam kriteria bebas gejala autokorelasi ($d_U < D-W < 4 - d_U$).

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menguji derajat keeratan dan arah hubungan antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig	Hasil Uji
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-34220676335	0,285		0,509	
X1	2,427	0,388	0,706	0,000	Diterima
X2	0,994	0,389	0,273	0,019	Diterima
Adjusted R Square	0,445				
F Hitung	19,875				
Sig. F Hitung	0,000				

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 2 dapat dibuat suatu model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots (2)$$

$$Y = -34220676335 + 2,427 X_1 + 0,994 X_2$$

Koefisien determinasi (R^2) dilihat dari besarnya nilai *Adjusted R Square* yaitu 0,445. Artinya 44,5 persen variasi tingkat pendapatan asli daerah Provinsi Bali dipengaruhi oleh kontribusi pajak kendaraan bermotor (X_1) dan kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor (X_2). Sedangkan sisanya sebesar 54,5 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Dalam penelitian ini, diperoleh nilai sig. $F_{hitung} = 0,000$. Nilai sig. F_{hitung} tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$; sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel bebas, yaitu kontribusi pajak kendaraan bermotor dan kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah di Provinsi Bali pada tahun 2013-2016.

Pengujian hipotesis dapat dilihat dari signifikansi hasil uji t masing-masing variabel diketahui bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) memiliki nilai $\beta = 2,427$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial kontribusi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Bali pada tahun 2013-2016. Dengan demikian, H_1 diterima. Sementara itu, kontribusi bea balik

nama kendaraan bermotor (BBNKB) memiliki nilai $\beta = 0,944$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,019 yang berarti lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Bali tahun 2013-2016. Dengan demikian, H_2 diterima.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa H_1 diterima, di mana variabel kontribusi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Artinya bahwa semakin meningkat kontribusi pajak kendaraan bermotor maka akan meningkatkan pula pendapatan asli daerah. Sebaliknya, semakin menurun kontribusi pajak kendaraan bermotor maka akan menurunkan pula pendapatan asli daerah. Lalu hasil dari penghitungan kontribusi pajak kendaraan bermotor pada pendapatan asli daerah di tahun 2013 adalah sebesar 30,15 persen, tahun 2014 sebesar 30,58 persen, tahun 2015 sebesar 32,04 persen, dan di tahun 2016 yaitu sebesar 34,99 persen. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun kontribusi pajak kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan secara stabil sehingga secara langsung memberikan pengaruh yang positif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh Rian (2010), Budi, dkk (2016), Suprayetno (2003), dan Zainuddin (2016) juga mengemukakan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah. yang menyatakan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini mendukung teori harapan

(*expectancy theory*) yang dalam konteks penelitian ini menyatakan bahwa jika pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali mulai meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB), menerapkan tarif pajak kendaraan bermotor secara progresif, dan memberikan hukuman/sanksi terhadap wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajka sesuai aturan yang berlaku, maka penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) tersebut akan meningkat, kemudian berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang ikut meningkat pula.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa H_2 diterima, di mana variabel kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Artinya bahwa semakin meningkat kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor maka akan meningkatkan pula pendapatan asli daerah. Sebaliknya, semakin menurun kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor maka akan menurunkan pula pendapatan asli daerah. Lalu hasil dari penghitungan kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor pada pendapatan asli daerah di tahun 2013 yaitu sebesar 47,12 persen, di tahun 2014 sebesar 41,55 persen, di tahun 2015 sebesar 35,51 persen, dan di tahun 2016 yaitu sebesar 34,02 persen, sehingga dari data tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun terjadi penurunan kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli (2013), Rakhmad, dkk (2014), Riama (2013), dan Fayrusz (2014) juga menyatakan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian

ini mendukung teori asas daya beli yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya pada bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), maka diperlukan peran pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi perekonomian yang stabil bagi masyarakat, sehingga dengan demikian perekonomian masyarakat dapat terus bertumbuh dan berkembang ke arah positif. Konsekuensi dari kondisi di atas, tentu akan meningkatkan daya beli masyarakat (Syaiful, 2013), sehingga dengan demikian pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan pada pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor agar lebih banyak berkontribusi bagi pendapatan asli daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Bali dari tahun 2013-2016. Pajak kendaraan bermotor secara rata-rata setiap tahunnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 31,94 persen dalam 4 tahun terakhir. Hal ini terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi di Provinsi Bali dari tahun ke tahun, sehingga akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali dari tahun 2013-2016, di mana bea balik nama kendaraan bermotor secara rata-rata setiap tahunnya memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah sebesar 39,55 persen

dalam 4 tahun terakhir. Berdasarkan data ini terlihat bahwa nilai rata-rata kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata kontribusi pajak kendaraan bermotor, namun jika dilihat per tahun, maka nilai kontribusi pajak kendaraan bermotor lebih besar dibandingkan dengan bea balik nama kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan agar pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dapat mempertahankan serta meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali, karena memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali, yaitu dengan cara mempertegas dan memperketat penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, perlu juga untuk meningkatkan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor karena memiliki pengaruh yang besar terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali, yaitu dengan cara memberlakukan proses samsat secara *online* sehingga dapat memudahkan bagi masyarakat. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar menambah variabel yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah di Provinsi Bali, seperti misalnya pajak bahan kendaraan bermotor, pajak rokok dan jenis pajak daerah lainnya.

REFERENSI

Agustina, Ruslianda dan Arliani, Rina. 2015. Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012. *Skripsi STIE Nasional*. Banjarmasin

- Ahmed, Masoom, Fazluz Zaman, Munshi Samaduzzaman. 2015. VAT Increase and Impact on Customer's Consumption Habit. *Asian Journal of Finance and Accounting*. Vol. 7 No. 1
- Andrew, Hanson. 2012. Three Simple Reasons Why We Need Progressive Tax Rates. *Research Analyst*. Georgetown Public Policy Institute
- Boediono. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Budi Kusuma Wijaya, Kharis Raharjo, & Rita Andini. 2016. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Accounting*. 2 (2)
- Chau, Liung. 2009. A Critical Review of Fisher Tax Compliance Model (A Research Synthesis). *Journal of Accounting and Taxation*. 1 (2), pp: 34-40
- Danuta, A. Nitecki. 1997. Measuring Service Quality. *Journal of Marketing*. Associate University Librarian, Yale University Library
- Darmayanti, Theresia Woro. 2004. Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, X ('): h: 108-109
- Diamond, Peter A and E. Saez, 2011. The Case for a Progressive Tax: From Basic Research to Policy Recommendations. *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 25 No. 4.
- Dyrenge, Scott D dkk. 2010. The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, Volume 85, No. 4, pp. 1163–1189.
- Ebrill, Liam. Michael Keen, Jean-Paul Bodin, and Victoria Summers. 2002. The Allure of The Value Added Tax. *Finance & Development*. 39 (2), pp: 44.
- Eriksen, K., & Fallan, L. (1996). Tax Knowledge and Attitudes Towards Taxation: A Report on a Quasi Experiment. *Journal of Economic Psychology*, 17, 387-402.
- Ermawati, Eka, & Ni Putu Eka Widiastuti. 2014. Pengaruh Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Investasi*. 10 (2), h: 103-114

- Eryandi, G. 2011. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu
- Fajariani. 2013. Analisis Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims. *Jurnal Akuntansi Unesa*. Vol 1
- Fernandez, Prafula and Pope, Jeff. 2002. International Taxation of Multinational Enterprises (MNEs). *Renemue Law Journal*. Vol. 12 : Iss. 1, Article 7.
- Halim, Abdul. 2001. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Ho, Daniel. 2004. A Study of Hongkong Tax Compliance Ethies. *International Business Research*, 2 (4)
- James, S dan C, Alley. 2004. Tax Complience, Self Assesment and tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Service*. 2 (2), pp: 27-42
- Joel, b. Slemrod. 2002. Do We Know How Progressive the Income Tax System Should Be. *National Tax Journal*. Vol.36 No. 3.
- Johnson, Gregory and Sare Piennar. 2013. Value Added Tax on Virtual World Transactions: A South African Perspective. *International Business and Economics Research Journal*. 12 (1), pp: 71-78.
- Khan, A.M., (2001).Reducing Traffic Density: The Experience of Hong Kong and Singapore. *Journal of Urban Technology*, 8:1, 69 – 87.
- Klepper, Steven dan Daniel Nagin. 1989. Tax Compliance and Preceptions of the Risks of Detection and Criminal Prosecution. *Law Society Review*. 1 (2), pp: 209-240
- Knut Eriksen, Lars Fallan. 1996. Tax Knowledge and Attitude Towards Taxation; report on a quasi-experiment, *Journal of Economic Psychology*, 1 (7), pp: 387-402
- Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik Edisi-III*. BPFE: Yogyakarta

- Margaretha, Anton Arisman, & Christina Yunita. 2016. Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data, Palembang
- Mustika, Sari Tri. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bemotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang
- Musnal. 2015. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kota Pariaman Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. *Jurnal*. Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa. Padang
- Natalia, K. 2014. Analisis Kontribusi, Efektivitas Pemungutan, dan Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat. Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang
- Nugraha, Haris. 2010. Penerapan Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Berdasarkan Perda Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya. Malang
- Oktofiandry Makaluas, dan Jantje Tinangon. 2015. Analisis Penerimaan Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Palda, Filip dan Jan Hanousek. 2002. Quality of Government Services and The Civic Duty to Pay Taxes in the Czech and Slovak Republics, and other Transition Countries
- Palil, M. R. 2005. Taxpayers Knowledge: A Descriptive Evidence On Demographic Factors In Malaysia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.7 No.1: p11-21.
- Parasuraman, Zeithaml, Berry. 1985. A Conceptual Model of Service Quality Its Implication Future Research. *Journal of Marketing*, 49:h:41-50.
- Rosalina, Fransiska Andar. 2008. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD setelah Otonomi Daerah (Studi

- Kasus pada Pemerintahan Kepulauan Riau). *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Ratnasari, Ida Ayu Putri. 2015. Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan di Denpasar. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*. 15 (2), pp: 887-914
- Rinaldi Wahfar, Rakhmad, Abubakar Hamzah, & Nur Syechalad. 2014. Analisa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai salah satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Universitas Syiah Kuala, Aceh
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Slemrod, Joel. 2007. Cheating Ourselves: The Economics Of Tax Evasion. *Journal of Economic Perspectives*, Volume 21, No. 1.
- Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R., 2008. *Concept of Taxation. Edition Orlando Florida*. Dryden Press. Harcourt Brace
- Sulistiyawati, Tri Lestari, dan Widi Tiandari. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Skripsi*. Universitas Semarang
- Suprayetno, Hero. 2003. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kutai Kartanegara. Tenggarong
- Susena, Karona Cahya dan Nurzam. 2014. Analisis Trend Peramalan Efektivitas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Dispenda Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen, Bengkulu
- Syaiful. 2013. Analisis Target Dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2009 – 2013 dan Kontribusi terhadap PAD pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung. *Skripsi*. Lampung
- Tripathi, Rivandra, Ambalinka Sinha, Sweta Argawal. 2011. The Effect of Value Added Tax on the Indian Society. *Journal of Accounting and Taxation*. Vol. 3 No. 2, pp: 32-39.

- Vines, C., & Moore, M. 1996. US Tax Policy and The Location of R&D. *Journal of the American Taxation Association*, 18 (2), pp: 74-88
- Winarso, Widi. 2015. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD (Studi Kasus pada Kantor CP DISPENDA Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II). *Skripsi*. Akademi Manajemen Keuangan Bina Sarana Informatika.
- Yunus, Abdul Thalib. 2010. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Economic Resources*. Vol. 11
- Zainuddin. 2016. Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*. Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate, Maluku.